



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Papua, Papua Barat, dan Maluku

2025



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target yang telah ditetapkan sepanjang tahun berjalan. Penyusunan laporan ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, laporan ini menjadi wujud kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus sarana untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Selain sebagai bentuk kepatuhan, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat kendali, instrumen penilaian kinerja secara kuantitatif, serta sarana transparansi dalam rangka mewujudkan good governance. Laporan ini juga menjadi umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di masa mendatang, sekaligus memberikan input bagi Kantor Pusat DJKN dalam melakukan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai serta jajaran vertikal di lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku atas kerja sama dan dedikasi dalam pengumpulan data serta penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025. Kontribusi dan komitmen yang diberikan menjadi bagian penting dalam tersusunnya laporan ini.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menyajikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Dengan demikian, laporan ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang konstruktif guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jayapura, 31 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Plt. Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan
Maluku



Ditandatangani secara elektronik

Indriasari Sundoro



Daftar Isi

	Pendahuluan	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
		Sumber Daya Manusia	6
		Sarana dan Prasarana	7
		Peran Strategis	8
		Permasalahan	10
		Upaya Pemecahan Masalah	11
			Perencanaan kinerja
Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2025	17		
Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2025	18		
Perjanjian Kinerja Tahun 2026	18		
	Akuntabilitas Kinerja		
		Kinerja Lainnya	55
		Realisasi Anggaran	58
	Penutup Lampiran		60
			61

BAB I

Pendahuluan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat dari pengelolaan dari peredaran uang negara.

Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Permasalahan
- E. Upaya Pemecahan Masalah

Bab I

Pendahuluan

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan unit instansi vertikal DJKN yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku terdiri atas 1 jabatan struktural eselon II (Kepala Kantor), 6 jabatan eselon III, dan 15 jabatan eselon IV sebagaimana diuraikan berikut.

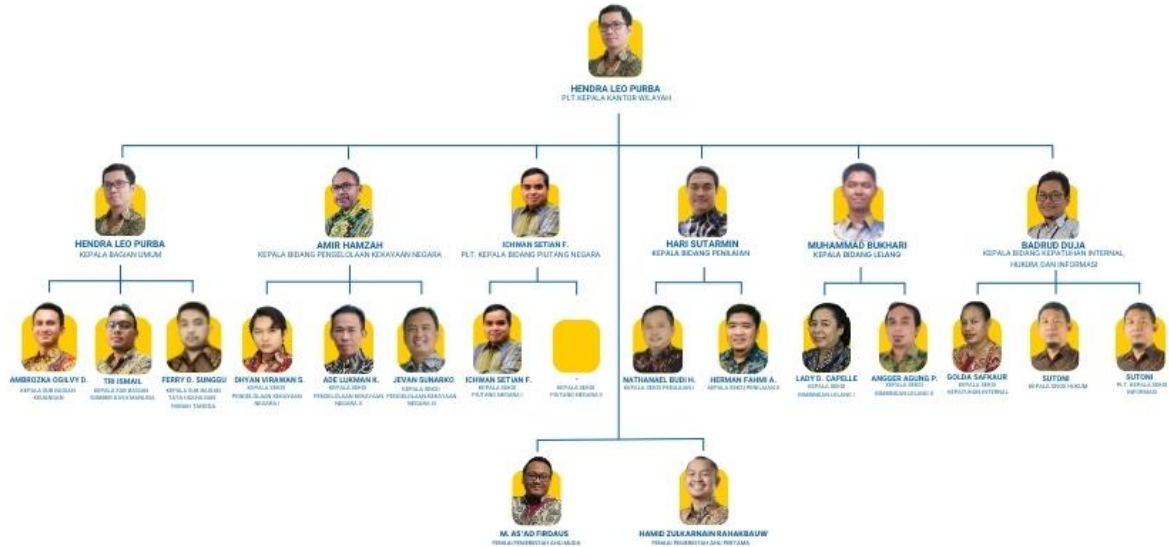
1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara (BMN) di lingkungan kantor wilayah.
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah.
3. Bidang Penilaian, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.
4. Bidang Piutang Negara, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek,

permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara.

5. Bidang Pelayanan Lelang, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang.
6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
 - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan; dan
 - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Struktur Organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku saat ini dapat dilihat pada bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

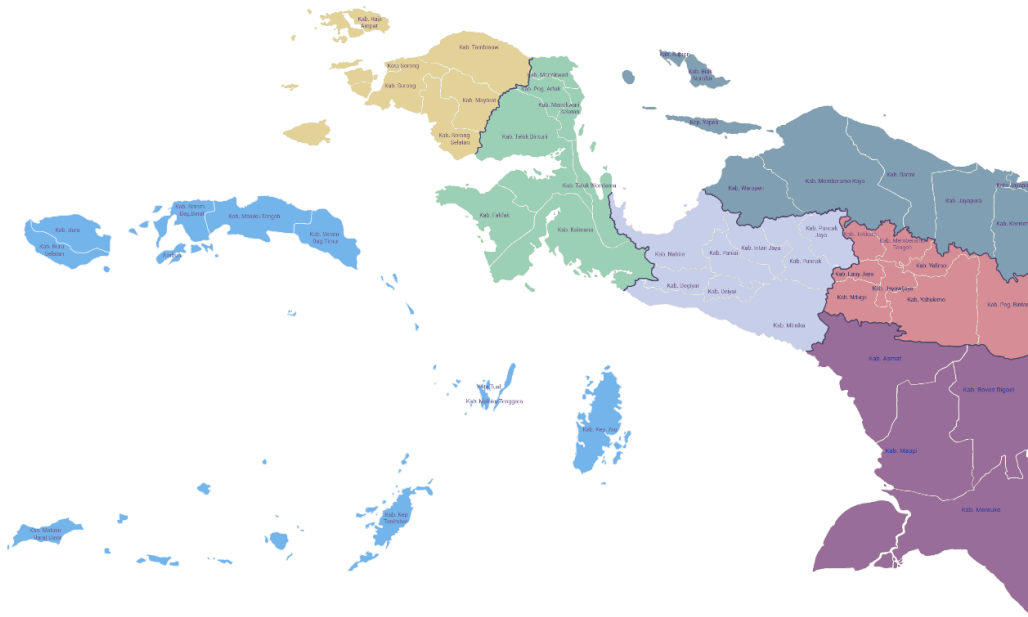


DATA PER 31 DESEMBER 2025

Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang dengan wilayah mencakup 7 provinsi, yaitu:

1. Provinsi Papua;
2. Provinsi Papua Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah);
3. Provinsi Papua Pegunungan (UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan);
4. Provinsi Papua Selatan (berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan);
5. Provinsi Papua Barat;
6. Provinsi Papua Barat Daya (UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya);
7. Provinsi Maluku.

Peta Wilayah Kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku



Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
4. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
5. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang

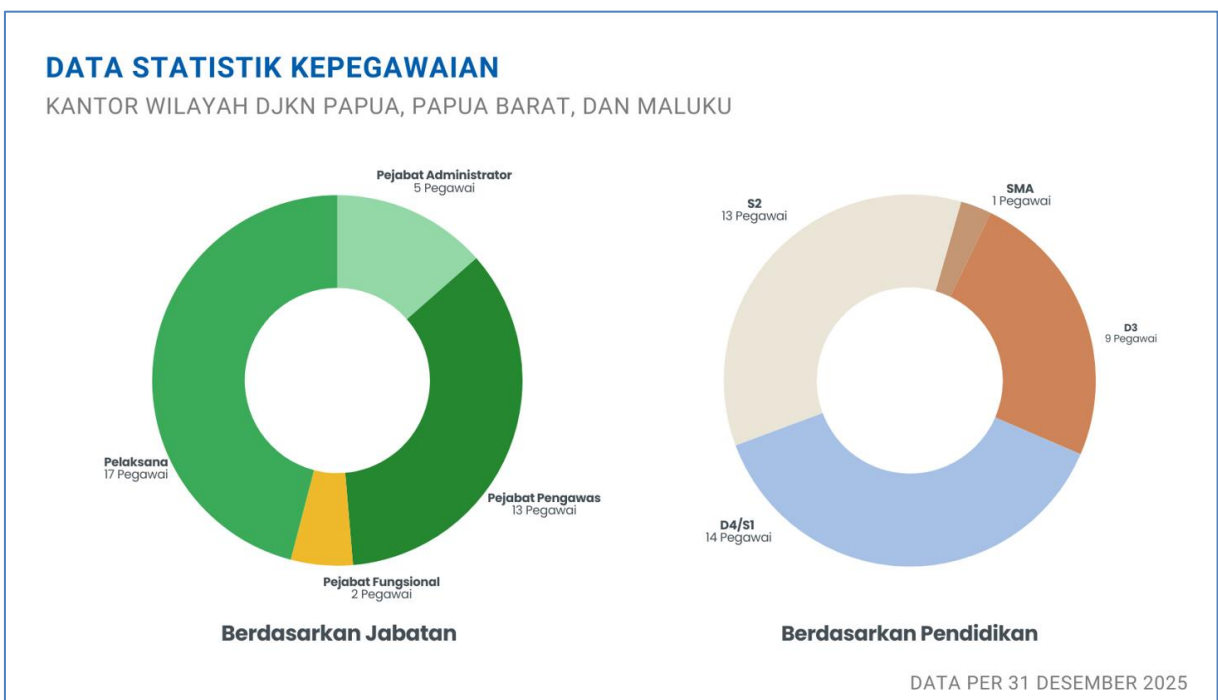
negara dan lelang;

8. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

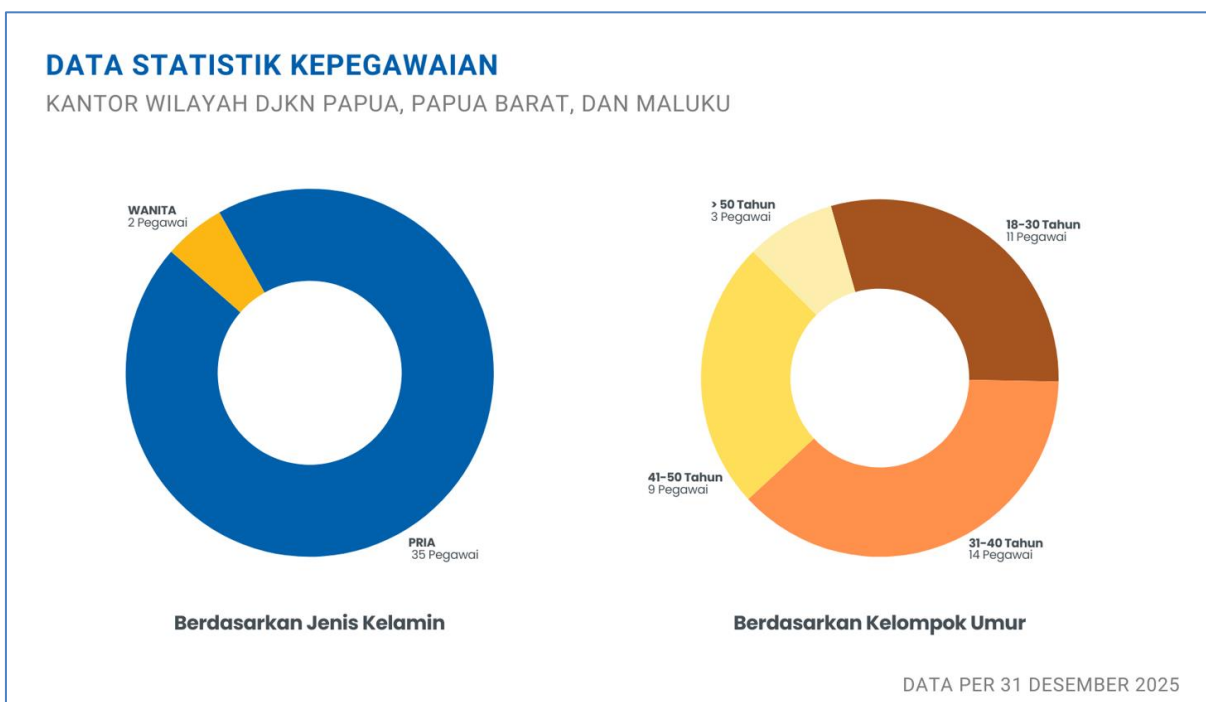
B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Hingga tanggal 31 Desember 2025, jumlah pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku beserta kantor operasional di bawahnya tercatat sebanyak 37 pegawai, termasuk 2 (dua) pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar. Komposisi pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Gender



Disamping pegawai berstatus ASN, terdapat 5 pegawai berstatus PPNPN yang membantu kelancaran pekerjaan administrasi perkantoran maupun mobilitas.

C. Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan operasionalnya Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah menempati Gedung Keuangan Negara Jayapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua tepatnya di Lantai 7. Disamping itu, guna kelancaran tugas Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas jabatan 1 (satu) unit mobil kondisi baik;
2. Kendaraan dinas operasional berupa mobil/R-4 sebanyak 9 (sembilan) unit minibus, dengan rincian mobil dengan kondisi baik sebanyak 6 (enam) unit; 1 (satu) unit mobil kondisi rusak ringan dan 2 (dua) unit mobil kondisi rusak berat. Terhadap mobil yang rusak berat telah dilakukan pemindahtangan dalam rangka penghapusan melalui lelang dengan hasil sudah laku dan saat ini dalam proses hapus buku;

3. Kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor /R-2 dalam kondisi baik sebanyak 4 (empat unit);
4. Peralatan komputer (PC) sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan perincian 16 unit dengan kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak dan siap dalam proses dihapuskan. Sementara peralatan kantor berupa laptop terdapat sebanyak 50 unit, dengan perincian 30 unit dalam kondisi baik; 11 unit rusak ringan; dan 9 unit rusak berat yang dalam proses penghapusan;
5. ruang kerja yang ber-AC; dan sarana penunjang lainnya berupa peralatan dan mesin yang merupakan instalasi Gedung Keuangan Negara Jayapura;
6. rumah dinas 10 (sepuluh) unit dengan 4 (empat) unit dalam kondisi baik dan (enam) unit dalam kondisi rusak ringan.

D. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi penyelenggaraan negara di bidang keuangan negara, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam bidang pengelolaan kekayaan negara adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Fokus utama pengelolaan tersebut meliputi utilisasi, pengamanan, pembinaan, serta penatausahaan kekayaan negara di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Selain itu, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memiliki mandat penting untuk melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis dalam menyediakan informasi nilai wajar sekaligus memberikan analisis mengenai penggunaan tertinggi dan terbaik (Highest and Best Use/HBU). Dengan demikian, peran ini tidak hanya mendukung optimalisasi pengelolaan aset negara, tetapi juga memberikan landasan bagi pemanfaatan aset secara produktif dan berkelanjutan.

2. Memberikan pembinaan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam bidang

Pengurusan Piutang Negara adalah melaksanakan penyelamatan keuangan negara melalui transformasi Non Performing Loan (NPL) menjadi aset yang lebih likuid dan berdaya guna. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pembangunan dengan cara melakukan penagihan serta pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah maupun unit lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengurusan piutang negara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelamatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan produktivitas aset negara dan memperkuat fondasi fiskal bagi pembangunan berkelanjutan.

3. Monitoring dan Pembinaan tugas pelayanan Lelang pada KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II

Lelang berperan besar dalam menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi sehingga lelang oleh KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu terobosan untuk ikut serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lelang memiliki 3 peran dalam perekonomian nasional yaitu:

- a. membantu pemulihan keuangan negara dengan menegakkan hukum melalui penjualan barang rampasan, sitaan dan barang milik negara;
- b. menyelesaikan kredit macet atau *nonperforming loan* (NPL) dengan tujuan untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan, melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang;
- c. menggerakkan roda perekonomian dengan meningkatkan potensi nilai barang dan membuka lapangan pekerjaan.

4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam

memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

E. Permasalahan

Permasalahan Internal

- a. Jumlah pegawai atau sumber daya manusia (SDM) yang tersedia saat ini masih kurang memadai dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja Kanwil DJKN yang cukup luas, meliputi tujuh provinsi (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku). Kondisi ini semakin menantang karena banyaknya stakeholder yang harus dilayani, baik dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah;
- b. Anggaran yang tersedia masih kurang memadai untuk menunjang mobilitas secara maksimal dari jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Keterbatasan ini muncul karena luasnya cakupan wilayah kerja dengan kondisi medan yang sulit, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Selain itu, adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi baru serta pemekaran wilayah setingkat kabupaten semakin menambah kompleksitas dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku;
- c. Berkenaan dengan DIPA penunjang kegiatan operasional, pada tahun 2025 tercatat mengalami efisiensi berupa pemblokiran sebagian anggaran. Kondisi ini berpengaruh terhadap kecepatan realisasi program dan kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan rencana kerja (Renja) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Permasalahan Eksternal

- a. Kondisi geografis alam yang berat dan menantang, didominasi oleh wilayah pegunungan serta luasnya cakupan kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, menjadi salah satu kendala utama. Sebagian besar wilayah hanya dapat

ditempuh dengan transportasi laut atau udara, sehingga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pemekaran wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pengendalian, yang harus dilakukan pada kondisi geografis dengan aksesibilitas sulit dan medan kerja yang berat;

- b. Kondusivitas tingkat keamanan di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku masih belum stabil dan sering kali sulit diprediksi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas, karena ketidakpastian situasi keamanan dapat memengaruhi kelancaran mobilitas, koordinasi, serta efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan;
- c. Adanya regulasi dan sistem norma setempat yang kurang mendukung pencapaian target kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menjadi salah satu tantangan eksternal. Misalnya, adanya norma yang mewajibkan pemberian kompensasi finansial kepada pemangku adat dalam proses pelepasan tanah, sehingga pelaksanaan lelang tanah menjadi kurang menarik bagi calon pembeli. Demikian pula dalam penertiban Barang Milik Negara (BMN), perluasan PNBPN dari pemanfaatan atau pengelolaan aset ikut terdampak dan cenderung kurang menguntungkan.

F. Upaya Pemecahan Masalah

Pemecahan Permasalahan Internal

- a. Telah diajukan permohonan kepada kantor pusat DJKN, baik melalui sarana formal maupun informal, untuk menempatkan tambahan pegawai di lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Namun, dengan kondisi jumlah pegawai yang masih belum memenuhi kebutuhan ideal, Kanwil tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada melalui pengaturan komposisi dan penempatan pegawai pada bidang tugas dan fungsi (tusi) yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi serta kinerja organisasi. Dari sisi kompetensi, upaya peningkatan terus dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan pegawai melalui berbagai pelatihan, diklat, workshop, maupun bentuk pembelajaran lainnya,

baik di lingkungan internal kantor maupun eksternal;

- b. Mengajukan permohonan penambahan pagu anggaran pada saat penyusunan RKAKL, serta melakukan refocusing terhadap belanja operasional dengan menekankan efisiensi penggunaan anggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dialokasikan secara optimal guna mendukung kegiatan prioritas, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Pemecahan Permasalahan Eksternal

- a. Mengajukan permohonan anggaran untuk jenis belanja modal dan belanja barang, serta menyelenggarakan acara atau kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu lokasi dengan cara mengundang dan mengumpulkan para stakeholder di tempat tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- b. Lebih selektif dalam menyelenggarakan kegiatan, acara, maupun perjalanan dinas, dengan memastikan bahwa setiap aktivitas benar-benar mendukung pencapaian tujuan prioritas. Selain itu, dilakukan koordinasi yang intensif dengan aparat terkait untuk pelaksanaan tugas-tugas yang memiliki risiko kerawanan tinggi, sehingga keamanan dan kelancaran kegiatan tetap terjaga;
- c. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang serta pemerintah daerah untuk memperoleh solusi yang tepat, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal Papua. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai budaya setempat, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mendukung pencapaian target kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Bab II

Perencanaan Kinerja

kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia



Laporan Kinerja | 14

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2025
- C. Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Visi DJKN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan **visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan"**. Adapun Visi Kementerian Keuangan adalah **"Menjadi Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan Keuangan Negara yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**.

1. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi yaitu:

- a. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- b. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
- c. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

2. Tujuan

Dalam rangka mendukung prioritas nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN dengan indikator :

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
- b. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
- c. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
- d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.
- e. pelayanan Lelang yang modern dan terpercaya;

3. Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN yaitu :

- a. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- b. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan.
- c. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
- d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

4. Kebijakan dan Program Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program.

a. Kebijakan

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara percepatan penyelesaian BKPN;
- 2) Peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas Pelayanan Lelang;
- 3) Peningkatan kualitas, pengawasan, dan pembinaan dalam Pengelolaan Kekayaan Negara termasuk diantaranya *The Irian Jaya Joint Development Foundation (IJJDF)*;
- 4) Pembinaan dan peningkatan kualitas Penilai Barang Milik Negara dan Penilai Barang Milik Daerah;
- 5) Peningkatan kualitas penyajian informasi dan komunikasi publik yang efektif
- 6) Penanganan masalah hukum ditingkatkan lewat koordinasi, kapasitas, dan mekanisme efektif untuk mendukung kelancaran tugas DJKN.

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) Percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) Percepatan pelayanan Lelang, termasuk dimulainya pemberlakuan portal lelang G.2;
- 3) Optimalisasi sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang, dan Lelang;
- 4) Optimalisasi upaya penyelesaian Perkara;
- 5) Pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 6) Tertib administrasi BMN;
- 7) Optimalisasi utilisasi kekayaan negara;
- 8) Optimalisasi Penilaian BMN;
- 9) Optimalisasi Informasi Publik;
- 10) Optimalisasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK); dan
- 11) Optimalisasi Keamanan Informasi.

B. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja Nomor PK-26/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025. Sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu-*Two*, Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian lengkap tentang SS dan IKU tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp62,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp842,1 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,7 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

C. Addendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Terhadap Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2025 Nomor PK-26/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025 tidak terdapat Addendum atas Perjanjian Kinerja tersebut.

D. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2026 Nomor PK-26/KN/2026 tanggal 30 Januari 2026 telah ditandatangani oleh Plt. Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri atas delapan sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp54,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,6 M)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 130,3 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karena peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

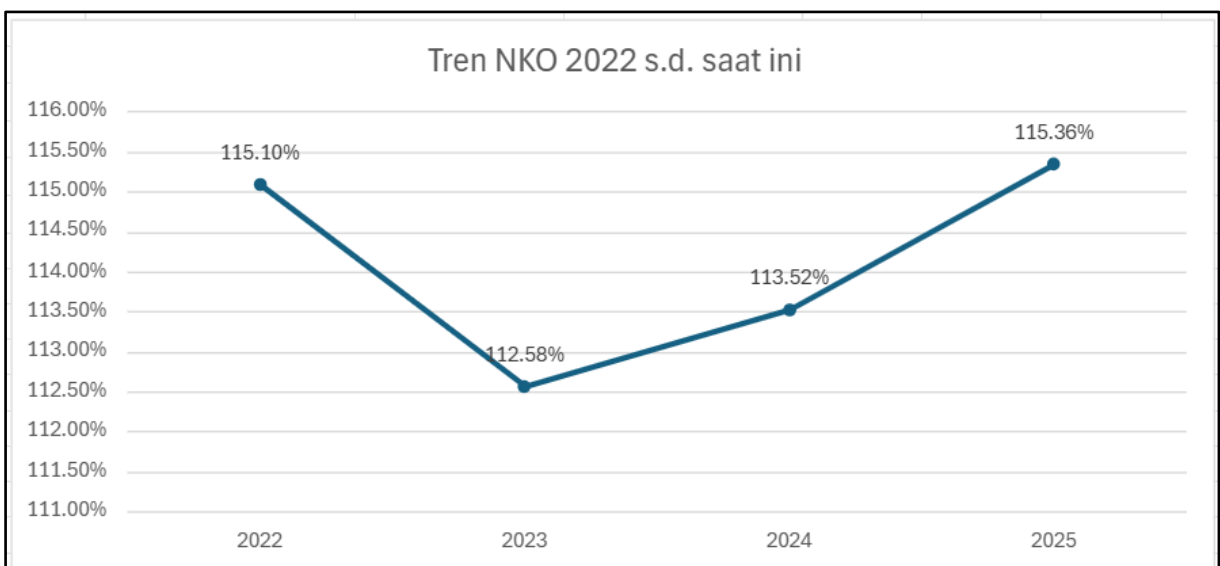
A. Capaian Kinerja Organisasi 2025

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah sebesar 115.36%.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			
1	113.18	2	111.27
	Stakeholder (30%)		Customers (20%)
3	117.33	4	119.27
	Internal Process (25%)		Learning & Growth (25%)
NKO			115.36%

Apabila dibandingkan dengan capaian NKO tahun tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada periode tahun kinerja 2025, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau dan satu IKU berstatus kuning.

Rincian capaian pada sasaran strategis dan indikator masing-masing IKU tergambar sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120.00%	120.00%
		Indeks Integritas	100%	105.32	105.32%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100.00	117.02	117.02%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	110.72%	110.72%
		Persentase Pokok Lelang	100%	81.49%	81.49%
		Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara	100.00%	171.73%	120.00%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74.00	164.81	120.00%
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70.00	96.00	120.00%
4.	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	111.72%	111.72%
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	117.59%	117.59%
5.	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100%	186.36%	120.00%
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	110.55%	120.00%
		Persentase produktivitas lelang	80.00%	109.41%	120.00%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100.00	120.00	120.00%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100.00	125	120%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80.00%	100.00%	120.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	6.21	120.00%
		Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100.00	115.65	115.65%
8.	Pengawasan dan Pengendalian Internal serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80.00	98.97	120,00% 200%
	NILAI NKO			115.36%	

Penjelasan masing-masing IKU untuk setiap sasaan strategis dapat dijelaskan pada bagian berikut. Pada bagian ini dijelaskan pencapaian IKU pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

- a. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;
- b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
- c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi;
- d. standar nasional (jika ada).

Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendapatkan mandat merumuskan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh DJKN penuh integritas dan secara akuntabel. Pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh DJKN mendukung transformasi ekonomi yang digaungkan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan suatu kondisi perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan

Pencapaian Sasaran strategis ini diperoleh dengan mengidentifikasi kinerja utama yang meliputi aktivitas pelayanan yang menjamin tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan; Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan

lelang dan menjaga integritas.

IKU-1: 1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

IKU ini bertujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan Kemenkeu kepada pengguna layanan dan stakeholders.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Dalam tahun 2025, IKU tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan telah dapat tercapai melampaui target, yakni 120%. IKU ini dicascadingkan ke KPKNL Ambon. Adapun secara trajectory dari pencapaian IKU tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

K-WIDE	SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya							
	1a-CP - Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	53.85%	92.31%	92.31%	92.31%	92.31%	120.00%	120.00%	
Capaian	269.25%	184.62%	184.62%	131.87%	131.87%	120.00%	120.00%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Selanjutnya pada table berikut digambarkan pelaksanaan IKU selama lima tahun terakhir, realisasi capaian menunjukkan tren dinamis dalam kategori sangat baik yakni selalu > 100% target, pada skala indeks yang berbeda-beda. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan dan

Renstra DJKN), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2025	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja	Standar Nasional	
2025	100%	4.20	4.20	4.20	-	120.00%
2024	100	4.20	4.20	4.20	-	106.40
2023	100	4.15	4.15	4.15	-	155.07
2022	4.40	4.10	4.10	4.10	-	4.73
2021	4.30	4.05	4.05	4.05	-	4.67

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

IKU-2: 1b-CP Indeks Integritas

Tujuan dari IKU ini adalah untuk menilai tingkat integritas satuan organisasi Kementerian Keuangan.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Pada Tahun 2025, KPK tidak melaksanakan survei penilaian integritas dikarenakan efisiensi sehingga tahun 2025 hanya dari Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas tahun 2024 saja.

Capaian IKU pada tahun 2025 Kanwil adalah sebesar 105,32% dari yang target yang ditetapkan, dengan trajectory sebagai berikut:

K-WIDE	SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya							
	1b-CP - Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	105.32%	105.32%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	105.32%	105.32%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	105.32%	105.32%	

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir apabila diperbandingkan, capaian IKU meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. IKU ini telah tercantum dalam Dokumen Renstra Kementerian Keuangan, dan rencana kerja (renja). Mulai dimunculkan menjadi target Kanwil sejak tahun 2023.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	105,32
2024	89.17	92	92	92	-	92.44
2023	88.67	91.5	91.5	91	-	89.17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90.5	90.5	90.5	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

IKU-3: 1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tujuan dari IKU ini adalah guna mendorong kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal terhadap penerimaan negara dan ketahanan APBN.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Juga Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Pada tahun 2025, capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, berhasil tercapai sebesar Rp73,075,275,143.00 atau sebesar 117.02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 62.400.000.000,-

Adapun gambaran trajectory pencapaian IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tahun 2025, sebagai berikut:

K-WIDE	SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang proaktif, adaptif dan terpercaya							
	1c-CP - Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK

Realisasi	144.68%	155.39%	155.39%	117.18%	117.18%	117.02%	117.02%	
Capaian	144.68%	155.39%	155.39%	117.18%	117.18%	117.02%	117.02%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	117.18%	117.18%	117.02%	117.02%	

Gambaran keterkaitan capaian IKU selama lima tahun terakhir, realisasi capaian dari target penerimaan negara ini selalu diatas 100%, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	117.02
2024	100	100	100	100	-	102.45
2023	100	100	100	100	-	109,13
2022	100	100	100	100	-	155,07
2021	100	100	100	100	-	138.99

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Indikator sasaran strategis ini dapat didekati dengan Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara; Persentase realisasi pokok lelang; dan Persentase penurunan outstanding Piutang Negara.

IKU-4: 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Tujuan dari IKU ini adalah mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan

keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Pengukuran optimalisasi BMN dilakukan pada 2 komponen pengukuran yaitu:

1. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Penggunaan BMN.
2. Optimalisasi BMN melalui mekanisme pemanfaatan BMN

Pada tahun 2025 pencapaian IKU ini adalah berstatus hijau dengan reliasasi capaian sebesar 110,72% dari target 100%. Adapun secara trajectory capaian IKU ini dapat digambarkan sebagai berikut:

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal							
	2a-Cp - Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	50.00%	60.00%	60.00%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	95.63%	99.08%	99.08%	102.67%	102.67%	110.72%	110.72%	
Capaian	191.26%	165.13%	165.13%	128.34%	128.34%	110.72%	110.72%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	110.72%	110.72%	

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir apabila diperbandingkan, IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 IKU Optimalisasi pengelolaan aset negara memperoleh capaian 117.21% yang dijabarkan dengan dua Sub-IKU yakni sub-iku tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dengan capaian 122,48% dan nilai capaian sub-iku Tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara sebesar 111,95%.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	110.72
2024	100	-	100	-	-	117.21
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

IKU-5: 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tujuan dari IKU ini adalah untuk Meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan lelang.

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Capaian iku ini pada tahun 2025 telah tercapai sebesar 81,49% dari target 100%. Secara rupiah Realisasi Pokok Lelang sebesar sebesar Rp 686,238,677,447,- dari target sebesar Rp842.126.000.000,- dengan demikian status capaian adalah kuning. Adapun trajectory capaian sebagai berikut:

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal							
	2b-CP - Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	107.51%	88.68%	88.68%	92.41%	92.41%	81.49%	81.49%	
Capaian	107.51%	88.68%	88.68%	92.41%	92.41%	81.49%	81.49%	
Nilai Kinerja	107.51%	88.68%	88.68%	92.41%	92.41%	81.49%	81.49%	

Tidak tercapainya target pokok lelang terjadi karena kebijakan di PT Pegadaian (persero) untuk mengedepankan restrukturisasi kredit daripada lelang. Potensi lelang laku pada tahun 2025 tidak sebesar potensi lelang laku pada tahun tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pokok lelang Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 sebanyak rata-rata 70% sampai dengan 80% pokok lelang berasal dari lelang Pegadaian. Signifikasi terlihat pada kurun waktu tahun 2021 dan 2022, PT Pegadaian (Persero) menerapkan kebijakan/program *recovery* atas *outstanding loan* sebagai strategi penurunan tingkat kredit macet/*non performing loan* (NPL) dengan cara melelang objek gadai tanpa perpanjangan masa gadai. Hal ini merupakan respons perusahaan atas situasi perekonomian yang terjadi paska Pandemi COVID-19.

Namun, kebijakan ini tidak dilanjutkan pada tahun 2023-2025 sehingga potensi objek lelang menjadi menurun. Di sisi lain baik Kanwil DJKN maupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi PT Pegadaian (Persero) agar menaikkan frekuensi maupun pokok lelang pegadaian.

Gambaran pencapaian IKU lima tahun kebelakang memperjelas pengaruh kebijakan PT. Pegadaian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	81.49
2024	100	100	100	100	-	61.27
2023	100	100	100	100	-	81.78
2022	100	100	100	100	-	213.66
2021	100	100	100	100	-	174.48

Selanjutnya, sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel di atas, menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

IKU-6: 2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan dalam IKU ini adalah untuk Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara.

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dihitung berdasarkan Nilai *Outstanding* Piutang Negara yang berhasil diturunkan kepada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang dihitung dari pembayaran angsuran oleh debitur dan nilai pengembalian BKPN, Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT), dan nilai penyelesaian dengan *Crash Program* Keringanan Utang (CPKU).

Pada Tahun 2025, IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berhasil mencapai realisasi 171,73%. Secara raw data nilai rupiah dari target penurunan outstanding Rp2,781 miliar telah berhasil dicapai realisasi penurunan outstanding sebesar Rp 4,775,897,704,-. Lonjakan besar pencapaian IKU

penurunan outstanding saldo BKPN ini salah satunya adanya pengembalian BKPN pada KPKN Biak sebesar Rp661.507.000,-. Adapun secara trajectory gambaran capaian iku ini sebagai berikut:

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal							
	2c-CP - Persentase penurunan outstanding piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	111.44%	96.64%	96.64%	137.31%	137.31%	171.73%	171.73%	
Capaian	111.44%	96.64%	96.64%	137.31%	137.31%	171.73%	171.73%	
Nilai Kinerja	111.44%	96.64%	96.64%	120%	120%	120%	120%	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian IKU selama kurun waktu 5 tahun terakhir maka capaian untuk IKU ini selalu diatas 100% dari target, sebagaimana dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	171.73
2024	100	-	-	-	-	1614.36
2023	100	-	-	-	-	128.62
2022	100	-	-	-	-	181.07
2021	100	-	-	-	-	174.48

Dapat disampaikan bahwa IKU Persentase penurunan outstanding piutang negara tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan Renstra DJKN tahun 2020-2024. Target IKU mulai dimunculkan pada tahun 2025 sesuai Renstra DJKN 2025-2029, Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan layanan berupa kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketepatan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan

pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan dua indikator yakni Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dan Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah.

IKU-7: 3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pengukuran IKU ini melalui empat komponen yakni:

1. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN
2. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang
3. Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian
4. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara

Realisasi capaian IKU pada tahun 2025 sebesar 222,71% dari target indeks sebesar 74.

Adapun trajectory pencapaian sebagai berikut:

K-Two	SS 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	
Realisasi	255.76	205.04	205.04	178.64	178.64	164.81	164.81	
Capaian	345.62	277.08	277.08	241.41	241.41	222.71	222.71	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, maka IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2025, merupakan IKU Non-Cascading dan tidak terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan Renstra DJKN tahun 2025-2029, Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

IKU-8: 3b-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah

Tujuan dari indikator IKU ini adalah guna memelihara kualitas penilai pemerintah dengan mengukur Tingkat Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Kompetensi Penilai Pemerintah di Instansi Pengguna.

Sebagaimana amanat PemenPANRB No11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara; Roadmap DJKN (2014-2019) "Distinguished Asset Manager"; Butir-Butir Rakernas Tahun 2023 (Pengembangan Fungsi DJKN sebagai Asset Advisory kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa), dan Rekomendasi Stakeholder dari "DJKN Mendengar" yang mana DJKN diamanatkan menjadi Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Urgensi kegiatan Bimbingan Teknis ini menjadi sangat penting mengingat bahwa latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak semua berasal dari jurusan terkait Penilaian yang sudah dibekali dengan Standar Penilaian yang berlaku di dunia penilaian, unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN) menjadi unit yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah di Luar DJKN. Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan juga dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna patutlah segera dilakukan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan terdiri dari:

1. Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non DJKN;
4. Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
5. Monitoring dan Evaluasi.

Realisasi ketercapaian pada IKU Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah pada tahun 2025 sebesar 137.14% pada target 70%. Adapun trajectory pencapaian IKU sebagai berikut:

K-TWO	SS 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N - Tingkat kompetensi penilai pemerintah							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	MAX/TLK
Realisasi	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	
Capaian	137.14	137.14	137.14	137.14	137.14	137.14	137.14	

Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, maka IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2025, merupakan IKU Non-Cascading dan tidak terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan Renstra DJKN tahun 2025-2029, Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan sasaran strategis tata kelola kekayaan negara yang efektif diukur dengan dua indikator IKU, yakni Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dan Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset).

IKU-9: 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Tujuan dari IKU ini adalah Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa

Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Pada tahun 2025, realisasi capaian Kanwil Papua, Papua Barat, dan Maluku pada IKU ini adalah sebesar 111.72% dari target sertipikasi BMN 100%.

K-ONE	SS 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4a-CP - Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	7.94%	56.35%	56.35%	81.54%	81.54%	111.72%	111.72%	
Capaian	158.82	140.88	140.88	135.91	135.91	111.72	111.72	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	111.72	111.72	

Apabila diperbandingkan dengan capaian selama lima tahun terakhir, penyelesaian kegiatan ini berhasil selalu mencapai >100% dari target dengan kondisi capaian dinamis setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	100	-	111.72
2025	100	-	100	100	-	167.58
2023	100	-	100	100	-	118.04
2022	100	-	100	100	-	112.68
2021	100	-	100	-	-	100.19

IKU ini tidak terdapat dalam dokumen renstra kemenkeu namun dicantumkan pada renstra DJKN 2020-2024 maupun Renstra DJKN 2025-2029 dan dokumen rencana kerja.

Selanjutnya, sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel di atas, menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk

Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

IKU-10: 4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Tujuan pelaksanaan kegiatan dalam IKU ini adalah guna mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Hal diatas adalah komponen A.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Adapun hasil kinerja Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2025 sebesar 117.59% dari target 100%, sebagaimana trajectory capaian IKU tersebut disajikan dalam tabel berikut:

K-TWO	SS 4: Penerapan tata kelola asset negara yang efektif							
	4b-N - Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100.00%	100.00%	
Realisasi	69.97%	87.55%	87.55%	104.63%	104.63%	117.59%	117.59%	

Capaian	466.44	175.10	175.10	139.50	139.50	117.59	117.59	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	117.59	117.59	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	117.59
2024	100	-	-	-	-	132.71
2023	100	-	-	-	-	116.24
2022	100	-	-	-	-	120.63
2021	100	-	-	-	-	126.74

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa IKU Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset) tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2025-2029, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara, penilaian dan lelang, penerapan tata kelola layanan dikatakan efektif apabila pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan sasaran strategis ini dilihat pada tiga indikator kinerja, yakni: Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara; Tingkat Kualitas Layanan Penilaian; dan Persentase Produktivitas lelang.

IKU-11: 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Tujuan IKU ini adalah Percepatan penyelesaian saldo BKPN dan validitas data Piutang Negara pada Aplikasi FocusPN serta konsolidasi data penyelesaian piutang dengan kualifikasi macet pada K/L/Pemda yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN namun telah dikelola secara optimal.

Indikator Kinerja Utama Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan

telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Pada tahun 2025, realisasi capaian persentase penyelesaian BKPN sebesar 186,36% dari target 100%. Adapun trajectory realisasi capaian iku dimaksud sebagaimana tabel berikut:

K-TWO	SS 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP - Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	270.00%	162.50%	162.50%	168.33%	168.33%	186.36%	186.36%	
Capaian	270.00	162.50	162.50	168.33	168.33	186.36	186.36	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dapat disampaikan bahwa IKU Persentase penyelesaian BKPN ini merupakan IKU baru yang dimunculkan pada tahun 2025. Kegiatan yang mirip atau terkait pada tahun sebelumnya tercatat pada IKU Persentase Saldo BKPN yang merupakan IKU minimize. Perbedaan utama yang menjadi penekanan pada saldo BKPN tahun 2025 adalah memasukkan kewajiban atau standar pengukuran berbasis data aplikasi fokusPN yang merupakan digitalisasi dari BKPN fisik.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	186.36
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Persentase Saldo BKPN ini tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu namun terdapat dalam dokumen rencana strategis DJKN tahun 2025-2029. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

IKU-12: 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Iku Tingkat Kualitas Layanan Penilaian bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas Penilaian. Rencana Hasil kerja yang ingin dicapai adalah untuk mendukung peningkatan PNBPN melalui Pengelolaan aset BMN.

Indikator Penilaian yang akuntabel dan profesional didapat pada:

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah

jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2. Akurasi data layanan penilaian (bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP)

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85. Target 2025: 80%

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku pada tahun 2025 diperoleh sebesar 157,92% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.

Adapun trajectory realisasi capaian iku dimaksud sebagaimana tabel berikut:

K-TWO	SS 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP - Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	112.00%	111.29%	111.29%	110.12%	110.12%	110.55%	110.55%	
Capaian	160.00	158.98	158.98	157.32	157.32	157.92	157.92	
Nilai kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Dapat disampaikan bahwa IKU Persentase penyelesaian BKN ini merupakan IKU baru yang dimunculkan pada tahun 2025.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70	-	70	-	-	157.92
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU ini tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu, namun terdapat dalam dokumen rencana strategis DJKN tahun 2025-2029. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

IKU-13: 5c-CP Persentase produktivitas lelang

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Diharapkan lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Capaian selama tahun 2025 teralisasi sebesar 136.76% dari target sebesar 80%, dengan trajectory capaian dapat digambarkan pada tabel berikut:

K-ONE	SS 5: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5b-CP - Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	
Realisasi	56.87%	68.24%	68.24%	87.75%	87.75%	109.41%	109.41%	
Capaian	189.57	170.60	170.60	125.36	125.36	136.76	136.76	
Nilai kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Produktivitas Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, target jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sd. 2025.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	80	-		136,76
2024	89	-	34	-		120.21
2023	80	-	34	-		116.22
2022	36	-	34	-		56.85
2021	35	-	32	-		48.91

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, namun tidak terdapat pada Renstra dan Renja Kemenkeu. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang Adaptif

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran ini dijelaskan pada tiga indikator yakni: Indeks kualitas kinerja anggaran; Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa; dan Persentase pengembangan kompetensi pegawai.

IKU-14: 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai

rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) Nilai kinerja anggaran kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari :

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. (PMK SBK terbaru tahun 2025 PMK 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025)

Realisasi capaian kinerja anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target 100%, dengan trajectory capaian sebagai berikut:

K-Two	SS 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP – Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MAX/TLK
Realisasi	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut gambaran pencapaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran selama lima tahun terakhir memperlihatkan kinerja yg terus meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	85	100	100	-	120
2024	100	84	95	100	-	120
2023	100	83	95	95	-	114.52
2022	95.5	82	95	-	-	97.25
2021	95,5	81	95	-	-	97.23

Selanjutnya, sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel di atas, menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis

Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan

IKU-15: 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini mengukur komponen berikut:

- a. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
- b. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Tujuan dari IKU ini adalah

Meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada rencana hasil kerja berupa Pengelolaan BMN yang Produktif.

Pada tahun 2025 capaian IKU Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku terealisasi sebesar 125% dari target 100%. Adapun trajectory dari capaian IKU tersebut adalah sebagaimana table berikut:

K-TWO	SS 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b- N – Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MAX/TLK
Realisasi	120	103	103	135	135	125	125	
Capaian	120	103	103	135	135	125	125	
Nilai Kinerja	120	103	103	120	120	120	120	

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, maka IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2025, merupakan IKU Non-Cascading dan tidak terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan Renstra DJKN tahun 2025-2029, Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

IKU-16: 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Indikator ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi

standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKI ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025 Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku berhasil memperoleh realisasi capaian kinerja pada IKU ini sebesar 125% dari target 80%, dengan gambaran trajectory pencapaian IKU sebagai berikut:

K-TWO	SS 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7b-N - Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	20.00%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	
Realisasi	29.14%	86.29%	86.29%	91.58%	91.58%	100%	100%	
Capaian	154.71	215.71	215.71	152.63	152.63	125.00	125.00	
Nilai kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut capaian IKU apabila dibandingkan dengan hasil kinerja pada kurun waktu lima tahun terakhir, konsisten pencapaian pada angka maksimal 120 % ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	100	-	-	-	-	120
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	120

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai ini tidak terdapat target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 dan Renstra DJKN tahun 2025-2029, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif

Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK.

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Indikator pencapaian sasaran strategis ini di jabarkan pada dua kegiatan yakni: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.

IKU-17: 7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi public dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi. IKU ini terdiri dari 2 unsur pengukuran yaitu Partisipasi Agenda Setting dan Employee Advocacy. Partisipasi Agenda Setting merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan sesuai taktik yang terdapat pada topik Agenda Setting Kementerian Keuangan. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut di tataran unit vertikal DJKN adalah dokumen strategi komunikasi tematik yang disampaikan secara berkala melalui nota dinas. Selama tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) strategi komunikasi tematik berdasarkan *Agenda Setting* Kementerian Keuangan. Adapun *Employee Advocacy* berupa tugas amplifikasi konten media sosial Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh pemangku tugas komunikasi. Pada tahun 2024, terdapat 15 topik yang perlu diamplifikasi

pemangku tugas.

Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan pada tahun 2025 adalah sebesar indeks 6,21 dari target indeks 3,55 sehingga capaian kinerja sebesar 175%. Adapun trajectory pencapaian iku ini tergambar sebagai berikut:

K-WIDE	SS 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi publik yang efektif							POL/K P
	9a-CP - Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	
Target	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	
Realisasi	6.57	6.57	6.57	6.09	6.09	6.21	6.21	
Capaian	185%	185%	185%	172%	172%	175%	175%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Gambaran pencapaian IKU dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana table berikut. Dalam dua tahun terakhir keberhasilan pencapaian target selalu > 100%.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	3.55	-	-	3.55	-	6.21
2024	3.55	-	-	3.55	-	5.23
2023	-	-	-	3.55	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya berkaitan dengan *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan renstra kemenkeu dan renstra DJKN, maka IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan di tingkat kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku baru disematkan menjadi IKU Kakanwil sejak tahun 2024, walaupun secara Renja Kemenkeu sudah dicanangkan sejak tahun 2023. Sedang dalam Renstra Kemenkeu dan renstra DJKN tidak menjadi target kegiatan. Dengan demikian hasil kinerja tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra dan Standar Nasional.

IKU-18: 7b-N Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Iku ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparaturnya di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya, dan

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Putusan adalah putusan atas

a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;

c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Pada periode kinerja tahun 2025 realisasi capaian Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku untuk IKU ini sebesar 115.65% dari terget 100%, dengan trajectory pencapaiannya sebagaimana table berikut:

K-TWO	SS 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi publik yang efektif							
	9a-CP - Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/K P

Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	114.50	115.70	115.70	116.15	116.15	115.65	115.65	
Capaian	114.50%	115.70%	115.70%	116.15%	116.15%	115.65%	115.65%	
Nilai Kinerja	114.50%	115.70%	115.70%	116.15%	116.15%	115.65%	115.65%	

Selanjutnya apabila diperbandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya, terlihat bahwa IKU ini baru dimunculkan sebagai IKU Kakanwil sejak tahun 2025.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	115.65
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Berkaitan dengan *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan renstra kemenkeu dan renstra DJKN terlihat bahwa IKU Penanganan Permasalahan Hukum tidak terdapat pada dokumen Renstra DJKN/Kemenkeu dan Renja DJKN/Kemenkeu, serta standar nasional. Dengan demikian dalam laporan kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Pencapaian sasaran strategis pada program ini diwujudkan dalam indikator kegiatan Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.

IKU-19: 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Tujuan yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan IKU ini adalah Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan

umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Adapun realisasi kinerja Kanwil pada tahun 2025 untuk IKU ini adalah dalam angka indeks sebesar 98.97 dari target indeks 80 atau diperoleh nilai capaian sebesar 123.71%, secara rinci sebagaimana trajectory tabel berikut:

K-TWO	SS 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N - Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	99.08	99.35	99.35	99.42	99.42	99.01	98.97	
Capaian	123.85%	124.18%	124.18%	124.28%	124.28%	116%	123.71%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Gambaran capaian IKU dibandingkan perjanjian kinerja selama lima tahun terakhir, bahwa IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2023, dan selama 3 tahun terakhir capaiannya diatas target indeks yang ditetapkan, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	98.97

2024	85	-	-	-	-	99.01
2023	80	-	-	-	-	96.65
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Berkaitan dengan proses *alignment* IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko, dapat dijelaskan bahwa IKU merupakan Non Cascading yang tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra-Renja Kemenkeu maupun DJKN, serta standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

Aspek-aspek Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Organisasi

Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2025 sebesar 115.35% . Angka ini meningkat dua point dari capaian tahun 2024 sebesar 113.59%, namun masih lebih tinggi dari rata-rata capaian selama 4 tahun terakhir (112,96%).

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara Internal

1. Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku melakukan upaya berkelanjutan dalam menciptakan budaya kerja organisasi yang positif. Dengan mengusung semangat “*noken ale torang bisa*” menjadikan keinginan kuat mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang merupakan aset kita bersama yang perlu kita jaga bersama untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk menjaga terpeliharanya dan Implementasi budaya organisasi yang positif ini, dilakukan internalisasi setiap pekan melalui kegiatan “Honai” setiap senin pagi yang diikuti seluruh pegawai dan PPNPN. Effort ini didukung dengan leadership yang baik dapat membantu menjaga organisasi berada di jalur yang tepat dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan kinerja. Kaitannya dengan kinerja, maka budaya organisasi yang positif dapat membantu meningkatkan kekompakan, motivasi dan produktivitas karyawan.
2. Sumber daya manusia di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku mampu digerakkan secara efektif dalam kondisi terbatas. Kita maklumi dari jumlah SDM yang jumlahnya terbatas, bagaimana memompa dan memelihara etos kerja yang tinggi di lingkup kerja zona remote adalah tantangan tersendiri. Keberhasilan pimpinan organisasi menjaga motivasi dan profuktivitas pegawai memberi signifikansi keberhasilan pencapaian kinerja.

3. Strategi alur kerja responsif dan mitigasi risiko; ketersediaan rumah dinas dan akses yang relatif mudah (aglomerasi kota jayapura kecil) dari seluruh pegawai memberi keuntungan relatif dalam respon yang cepat dalam menanggapi isu-isu dan penyelesaian tuis yang lebih cepat. Selanjutnya secara kontinyu melakukan mitigasi risiko dan antisipasi tindakan untuk mencegah kegagalan pencapaian indikator kinerja;

Secara Eksternal

1. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kesepahaman yang tinggi kepada satker dan stakeholder lainnya baik instansi pusat maupun instansi daerah tentang urgensi pengelolaan kekayaan negara, penilaian aset, dan lelang secara tertib dan memberi tambahan manfaat moneter (PNBP) maupun meningkatkan efisiensi penggunaan BMN/BMD dan aset lainnya;
2. Memperluas inklusi dan kampanye literasi keuangan negara dan APBN kepada semua pihak dan masyarakat guna meningkatkan persepsi positif fungsi kementerian keuangan sekaligus memperluas manfaat keberadaan perwakilan kementerian keuangan di daerah. Salah satu yang dilakukan adalah kerjasama dengan kampus-kampus di wilayah papua dalam bentuk bantuan tenaga pengajar, kerjasama dengan pemerintah daerah dan bantuan edukasi sektor UMKM.
3. Memanfaatkan dan mengupdate teknologi informasi dan jaringan komunikasi yang efektif dalam memperlancar pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat.

Aspek-aspek Penghambat Pencapaian Kinerja Organisasi

1. Kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia (ASN) yang ditempatkan di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Kondisi SDM yang berpengaruh dalam rangka pencapaian kinerja organisasi adalah berkenaan dengan aspek motivasi dan produktivitas. Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku sebagai kantor vertikal yang berada di zona remote berada dalam beziting jumlah pegawai yang kurang secara jumlah. Demikian juga secara "lokasi" memberikan dampak psikologis tertentu kepada para pegawai terutama dari aspek tekanan biaya hidup, biaya pulang ke homebase dan kewaspadaan gangguan keamanan. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan demotivasi pegawai yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Kekurangan SDM di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dalam dua tahun terakhir terdapat pada hamper semua jenjang jabatan.

2. Daya dukung anggaran

Luas geografis wilayah kerja berikut potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan tugas instansi dan kehidupan sehari-hari pegawai, dengan sendirinya merupakan faktor sebab akibat/kondisi negatif dibutuhkannya dukungan anggaran yang besar. Dengan kondisi anggaran yang dibatasi, berbagai agenda dan strategi percepatan pencapaian target kinerja dalam banyak hal terbentur pada kondisi minor tersebut.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam laporan kinerja ini diutamakan pada penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan. Dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, kita dapat mengurangi biaya, dengan tetap meningkatkan produktivitas.

Realisasi anggaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.125.999.324,- atau 61,65% dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp5.070.635.000,-. Penggunaan anggaran tersebut telah berhasil mendukung pencapaian kinerja organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku yang berhasil memperoleh nilai NKO tahun 2025 sebesar 115,35%. Artinya organisasi berhasil mencapai kinerja optimal (status hijau) dari DIPA yang disediakan dan tidak habis terserap, menggambarkan terpenuhinya aspek efisiensi dalam penggunaan sumber daya terutama sumber daya DIPA.

Salah satu upaya dalam mencapai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah kepatuhan dalam penyerapan DIPA sesuai RPD dan selalu dilakukan monitoring berkelanjutan sekaligus menyelesaikan langsung jika ada deviasi pelaksanaan anggaran.

Secara terperinci jumlah rupiah pengeluaran belanja per kegiatan yang mendukung pencapaian IKU digambarkan dalam tabel pada bagian lampiran laporan LAKIN ini.

Apabila diperbandingkan alokasi DIPA terhadap pencapaian NKO selama 5 tahun terakhir terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Pagu Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Target NKO	Capaian NKO
2020	Rp4.754.620.000	98,27%	100%	110,05%
2021	Rp2.307.929.000	97,23%	100%	113,51%
2022	Rp1.935.303.000	97,25%	100%	115,10%
2023	Rp3.096.802.000	91,73%	100%	112,59%
2024	Rp3.730.430.000	98,41%	100%	113,59%
2025	Rp5.070.635.000	61.65%	100%	115.35%

B. Kinerja Lainnya

Inovasi dan Penguatan Infrastruktur

Guna menunjang kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, berbagai inovasi layanan juga telah disusun dan diterapkan agar memberikan kemudahan pelayanan dan kecepatan menjangkau *stakeholder*. Adapun beberapa inovasi layanan yaitu:

1. Buletin Lelang Unggulan, merupakan platform majalah online yang menyediakan informasi barang-barang yang akan dilelang berikut informasi pendukung lelang lainnya guna memperluas cakupan penyebaran dan atau pemasaran objek lelang yang akan dilelang oleh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku;
2. dashboard capaian kinerja *realtime*, merupakan link web tempat menginput dan menyajikan informasi kinerja dan dokumen pendukung baik kinerja organisasi maupun kinerja pegawai.
3. Layanan pengaduan melalui media aplikasi *whatsapp*.

Disamping itu, dalam upaya mendukung dan menunjang *gender equality* dan *disability* telah dilakukan dengan optimal dengan mewujudkan sarana prasarana yang menunjang yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Ibadah/Musholla Khusus Wanita

Musholla khusus wanita di Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen dalam mendukung dan menunjang kesetaraan gender. Fasilitas ini memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi para pegawai wanita untuk menjalankan ibadah mereka tanpa hambatan. Dengan adanya

musholla khusus ini, diharapkan para pegawai wanita dapat merasa lebih dihargai dan diakui hak-haknya, serta semakin termotivasi untuk berkontribusi lebih maksimal dalam lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Langkah ini juga menegaskan bahwa DJKN berupaya menciptakan tempat kerja yang adil dan setara bagi seluruh karyawan tanpa memandang gender.



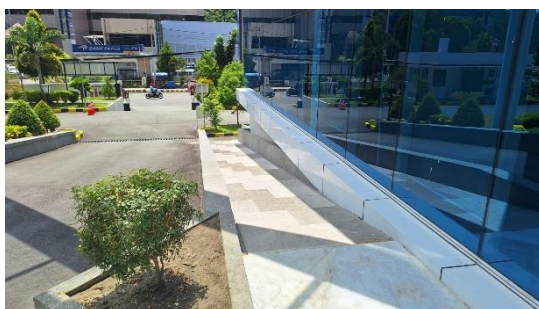
2. Ruang Laktasi

Ruang laktasi di Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah salah satu inisiatif penting dalam mendukung dan menunjang kesetaraan gender. Fasilitas ini dirancang khusus untuk memberikan ruang yang aman, bersih, dan nyaman bagi ibu menyusui di tempat kerja, sehingga mereka dapat menjalankan peran ganda sebagai profesional dan ibu dengan lebih baik. Dengan adanya ruang laktasi, DJKN menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesejahteraan semua pegawai, tanpa memandang gender. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan, serta memperkuat budaya kerja yang adil dan setara di semua level organisasi.



3. Fasilitas penunjang disabilitas

Penyediaan kursi roda dan ramp di Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan langkah strategis dalam mendukung dan menunjang inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas ini memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pegawai dan pengunjung dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat bergerak dengan lebih bebas dan aman di lingkungan kerja. Dengan adanya kursi roda dan ramp, DJKN menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan tempat kerja yang ramah dan setara bagi semua individu, tanpa memandang kondisi fisik. Inisiatif ini juga mencerminkan upaya DJKN untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas dan memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat berkontribusi secara optimal.





Achievement Lainnya

Pada bagian lain, banyak pencapaian/*achievement* yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dengan beberapa kegiatan dalam rangka implementasi *sosial inclusion*, guna memberi dampak manfaat yang lebih luas akan keberadaan organisasi Kementerian Keuangan di masyarakat, antara lain :

1. Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memperoleh penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Kategori Informatif pada Tahun 2025.
2. Pelaksanaan Lelang Hak Menikmati berupa sewa ruang Barang Milik Negara (BMN) pada Terminal Entrop, Jayapura yang perdana terlaksana pada 6 November 2025 sebagai bagian dari inovasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan meningkatkan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi (SOLID) Lelang UMKM pada tanggal 23 Oktober 2025 di Aula Cendrawasih, Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kegiatan ini dihadiri pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 32 pelaku usaha UMKM dengan membawa produk UMKM masing-masing yang bertujuan mengenalkan serta menyimulasikan lelang UMKM melalui aplikasi lelang.go.id oleh Pelelang.
4. Pelaksanaan Pelatihan Penilai Barang Milik Daerah (BMD) Bersama Pemerintah Daerah di Wilayah Papua dan Maluku yang bersinergi dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN pada tanggal 11 Agustus hingga 14 Agustus 2025 dan 19 hingga 22 Agustus 2025 yang juga merupakan pelaksanaan Pelatihan Penilai BMD yang pertama di Indonesia.
5. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara bersama dengan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan

Maluku pada 11 Juni 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Satker K/L terhadap proses bisnis pengelolaan piutang negara yang meliputi penatausahaan, penagihan, penyelesaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

6. Kantor Peringkat III Terbaik Tingkat DJKN dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2024 dan Tahun 2025

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.125.999.324,- atau 61,65% dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp5.070.635.000,-. Pagu anggaran terdiri dari dua jenis belanja, yaitu belanja barang dan belanja modal sebagai berikut:

No	Kode / Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja		Total
			Barang	Modal	
1	506409 Kanwil DJKN Papabaruku	Pagu Anggaran	2,932,094,000	2,138,541,000	5,070,635,000
		Realisasi Anggaran	2,282.347,364	843,651,960	3,125,999,324
		%	77.84	39.45	61.65
		Sisa Anggaran	649,746,636	1,294,889,040	1,944,635,676


Rincian belanja dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk belanja barang mencapai 77,84% dari pagu anggaran yang ditetapkan, sementara belanja modal terealisasi sebesar 39,45%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi untuk belanja barang sebesar Rp649.746.636,-, dan untuk belanja modal sebesar Rp1.294.889.040,-.

Secara keseluruhan, rendahnya penyerapan anggaran pada belanja modal pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku disebabkan oleh kebijakan pemblokiran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah efisiensi dalam mengelola keuangan negara. Realisasi anggaran belanja modal pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang tidak diblokir adalah Rincian Output (RO) Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Kendaraan Bermotor. Sedangkan Belanja Modal Gedung/Bangunan (renovasi rumah dinas) diblokir seluruhnya sehingga tidak ada penyerapan pada RO dimaksud.

Bab IV

Penutup

Matahari juga turut berpengaruh dalam menjadi siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkul kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

Bab IV

Penutup

Capaian Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang istimewa dengan nilai NKO sebesar 115,35%. Dari total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), hampir seluruhnya berhasil dicapai bahkan melampaui target (kategori hijau), dengan hanya 1 IKU yang tidak tercapai (kategori kuning), yaitu Realisasi Pokok Lelang. Meski demikian, secara agregat capaian tersebut tetap menghasilkan peningkatan NKO dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras, semangat, serta konsistensi pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku beserta jajaran KPKNL dalam menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang optimal dan berkesinambungan.

Meskipun terdapat berbagai masalah dan kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi kami untuk berhenti memberikan yang terbaik bagi organisasi. Justru tantangan tersebut menjadi dorongan untuk bekerja lebih giat sekaligus terus menumbuhkan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai karakter kinerja seluruh pegawai. Dengan tekad yang kuat, kami berkomitmen untuk mempertahankan prestasi dan capaian kinerja yang telah diraih, serta senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang.

&&&

LAMPIRAN

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANWIL DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
 Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective	
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV							
Stakeholder Perspective (30%)												
	1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya		-						113.18		
1	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	29.79%	120.00	120.00	35.74	113.18
2	1b-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100.00	105.32	19.00%	40.43%	105.32	105.32	42.58	
3	1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	117.02%	14.00%	29.79%	117.02	117.02	34.86	
Customer Perspective (20%)												
	2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		-							102.54	
4	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	110.72%	19.00%	36.54%	110.72	110.72	40.46	111.27
5	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	81.49%	19.00%	36.54%	81.49	81.49	29.77	
6	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	171.73%	14.00%	26.92%	171.73	120.00	32.31	
	3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa		-							120.00	
7	3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	164.81	14.00%	50.00%	222.71	120.00	60.00	117.33
8	3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	Max	P/M	70.00	96.00	14.00%	50.00%	137.14	120.00	60.00	
Internal Process Perspective (25%)												
	4	Penerapan tata kelola aset yang efektif		-							114.65	
9	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100.00%	111.72%	14.00%	50.00%	111.72	111.72	55.86	117.33
10	4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.00%	117.59%	14.00%	50.00%	117.59	117.59	58.79	
	5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		-							120.00	
11	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	186.36%	14.00%	33.33%	186.36	120.00	40.00	117.33
12	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	110.55%	14.00%	33.33%	157.92	120.00	40.00	
13	5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80.00%	109.41%	14.00%	33.33%	136.76	120.00	40.00	
Learning and Growth Perspective (25%)												
	6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		-							120.00	
14	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	119.27
15	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100.00	125	14.00%	33.33%	125	120	40.00	
16	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80.00%	100.00%	14.00%	33.33%	125.00	120.00	40.00	
	7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif		-							117.82	
17	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Max	P/M	3.55	6.21	14.00%	50.00%	175.00	120.00	60.00	119.27
18	7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100.00	115.65	14.00%	50.00%	115.65	115.65	57.82	
	8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif		-							120.00	
19	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80.00	98.97	14.00%	100.00%	123.71	120.00	120.00	
NKO											115.36	



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-26/KN/2025**

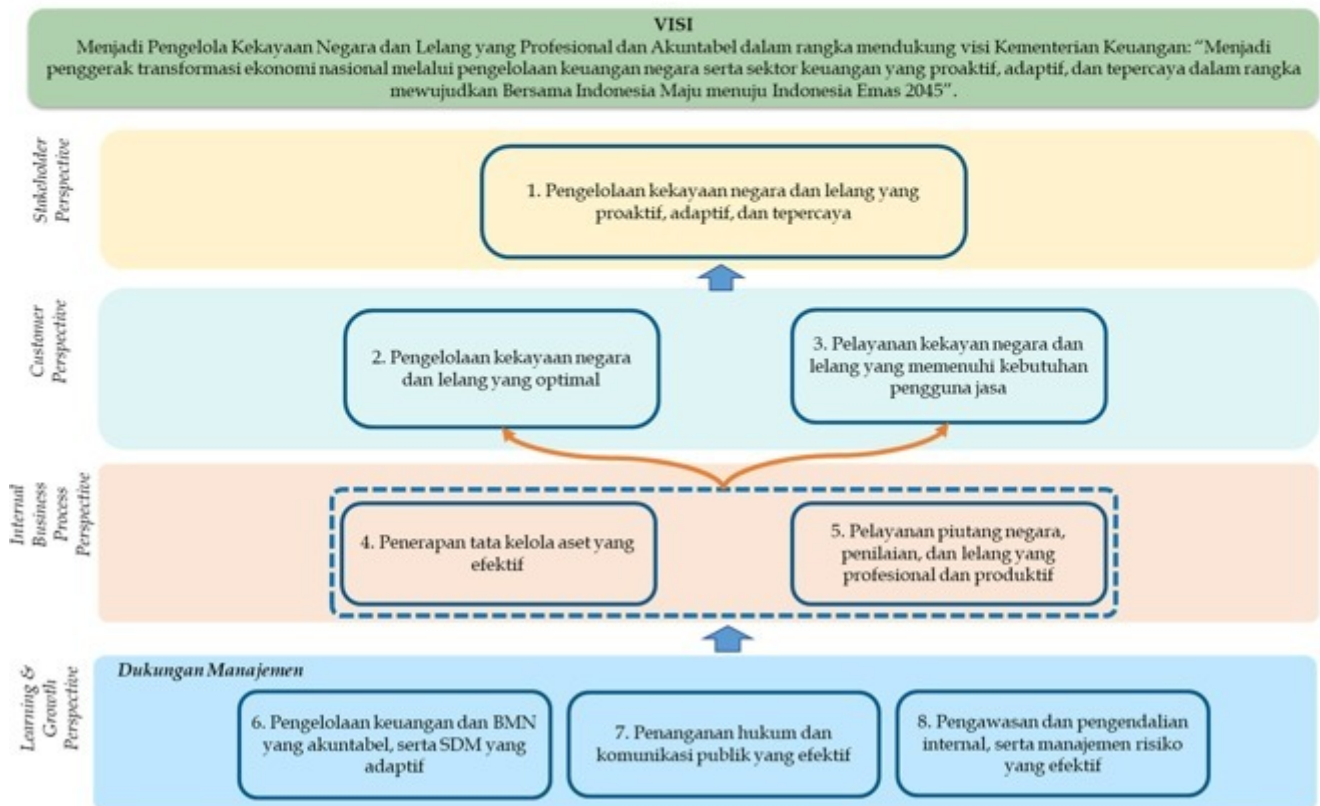
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp62,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp842,1 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,7 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Anggaran



Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp1,251,540,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp182,589,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp466,173,000
3. Pengelolaan Aset	Rp602,778,000
Program:	
Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp3,640,485,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp41,802,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp3,487,272,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp42,235,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp69,176,000

Kota Jayapura, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Kristijanindyati Puspitasari



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp62,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp842,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,7 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Jayapura, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Kristijanindyati Puspitasari



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Jayapura, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Kristijanindyati Puspitasari



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kristijanindyati Puspitasari		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19700729 199603 2 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp62,4 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp842,1 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,7 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Jayapura, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Kristijanindyati Puspitasari

19700729 199603 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	117 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp62,4 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp842,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,7 M)



3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Kota Jayapura, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Kristijanindyati Puspitasari

19700729 199603 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





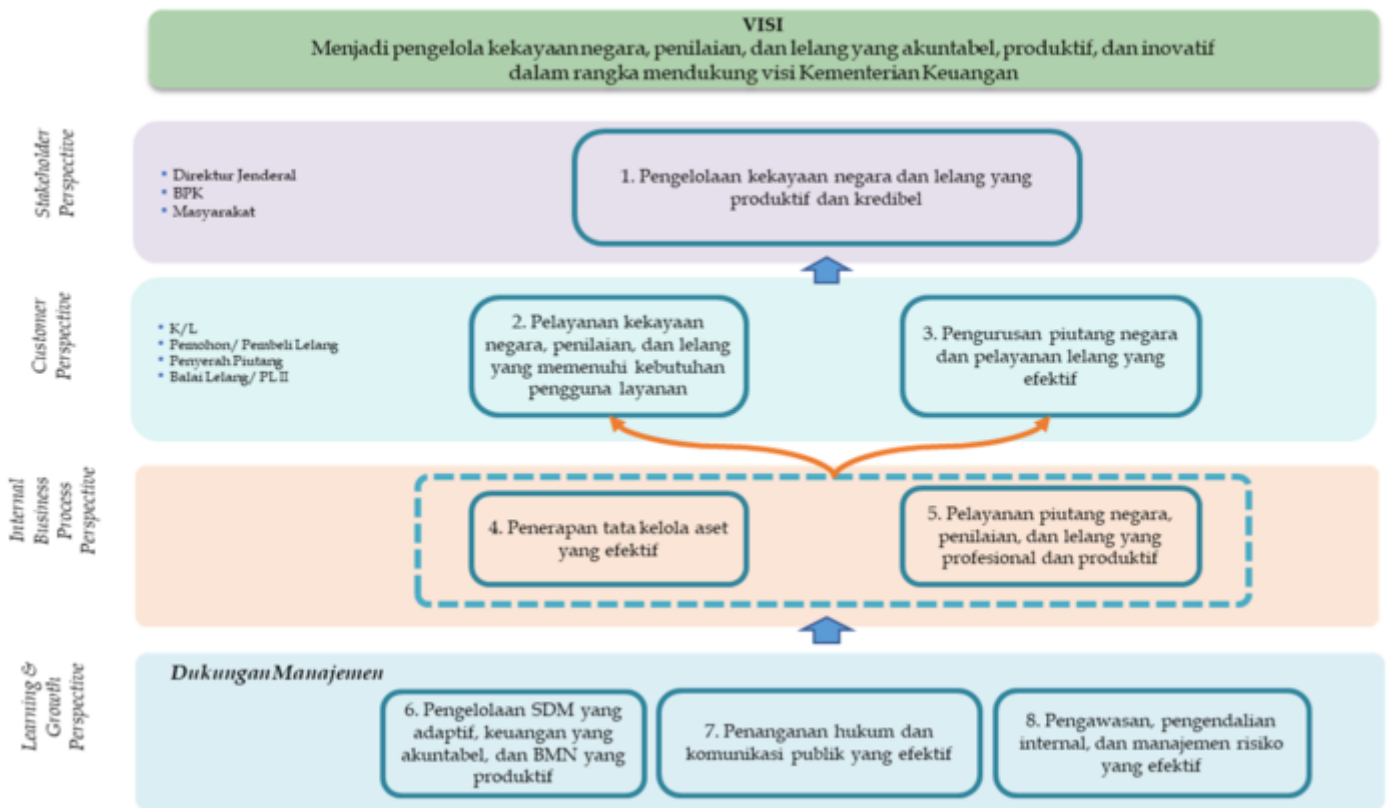
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-26/KN/2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp54,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,6 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 130,3 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp1,083,450,000



Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp128,266,000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp484,325,000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp470,859,000 |

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp2,811,627,000
----------------------------	-----------------

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp41,802,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp2,679,673,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp55,484,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp34,668,000 |

Jayapura, Januari 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp54,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,6 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 130,3 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Jayapura, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jayapura, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	R. Ay. Indriasari Sundoro		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19750219 199503 2 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp54,4 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
		Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,6 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 130,3 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jayapura, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	126 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp54,4 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,6 M)



3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	(Rp 130,3 M)
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%	
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100	
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80	
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80	
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80	
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100	
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83	
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jayapura, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro

19750219 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PENGHARGAAN PPID DARI MENTERI KEUANGAN TAHUN 2025



PENGHARGAAN
KANTOR PERINGKAT III TERBAIK MANAJEMEN RISIKO
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: PIAG-56/KN/2025

Diberikan kepada:

KANWIL DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU

ATAS PRESTASI TIGA UNIT TERBAIK
MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Jakarta, 30 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: PIAG-14/KN/2026

Diberikan kepada:

**KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU**

ATAS PRESTASI TIGA UNIT TERBAIK
MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Jakarta, 27 Januari 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

**KINERJA & ACHIEVEMENT LAINNYA
TAHUN 2025**

(Deskripsi tertayang pada Media Ig:

<https://www.instagram.com/djknpapabaruku?igsh=YjhgYnJtNDZhaDk5>)

SOSIALISASI LELANG UMKM



SINERGI PENGELOLAAN BMD BERUPA BIMTEK PENILAIAN DAN PENGGUNAAN DKPB
DENGAN PEMDA PAPUA MAUPUN PEMKOT JAYAPURA





Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku bersama Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan dan Penggunaan Daftar Komponen Pemilaian Bangunan



djknpapabar
ku
djknpapal

Follow

Kantor Wilayah DJKN Pa... more

SINERGI DENGAN SATKER KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BPTD II TERMINAL ENTROP – UNTUK PEMANFAATN BMN – LELANG HAK MENIKMATI

